



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI PENGATURAN ADOPSI SETELAH
BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG
PELAKSANAAN PELAKSANAAN ANAK**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

Oleh:

**DIAH TRIANI PUSPITA SARI
0706177444**

Pembimbing :

Surini Ahlan Sjarif, SH, MH

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2010**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Diah Triani Puspita Sari
NPM : 0706177444
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Implementasi Pengaturan Adopsi Setelah Berlakunya
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini Ahlan Sjarif, SH, MH (.....)
Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH (.....)
Penguji : Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 7 Januari 2010

KATA PENGANTAR

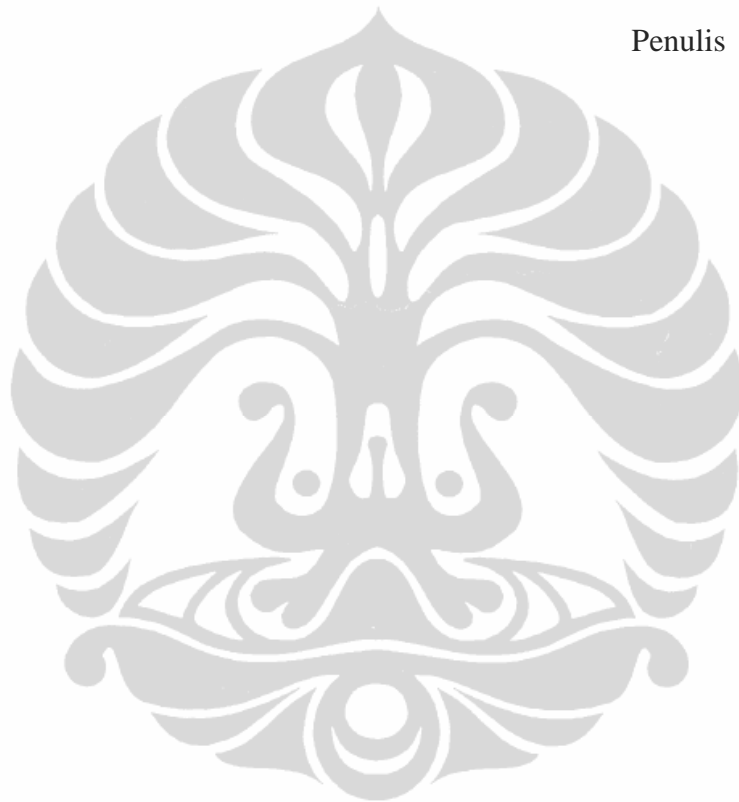
Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Program Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Alm. Ipnulloh Suryanto, yang tesis ini saya persembahkan secara khusus, atas motivasi, semangat dan dorongannya maka saya dapat menempuh program Magister Kenotariatan dengan baik dan menyelesaikan penulisan tesis ini.
- (2) H. Drs. Heriyanto, Akt., dan Hj. N. Purbowati, orang tua saya yang selalu mendoakan saya dengan tulus, memberikan motivasi, nasihat serta dukungan baik moril maupun materiil.
- (3) Ibu Surini A. Sjarif, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (4) Drs. H. Moh. Ridwan, M.M, ayah angkat saya atas motivasi, nasihat serta dukungan baik moril maupun materiil dan doanya yang tulus.
- (5) Keluarga saya, Indah Nurlaela, S.E., Dian Izati Riskana, S.E., dan Faisal Haris, S.E., Alief, Juan, Cleo, Raka dan Farrel yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
- (6) Sahabat saya, Annisa, Sandra, Dewi, Vina, Grace, mba Ellen, Dina, Mar, Edwin, Bimo, Yade, Parto, Tanjung, Arya dan Wahyu yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.
- (7) Teman-teman angkatan 2007 Universitas Indonesia Fakultas Hukum Magister Kenotariatan.

Akhir kata, saya berharap Allah Swt berkenan membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 7 Januari 2010

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Triani Puspita Sari
NPM : 0706177444
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PENGATURAN ADOPSI SETELAH BERLAKUNYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54
TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada tanggal: 7 Januari 2010

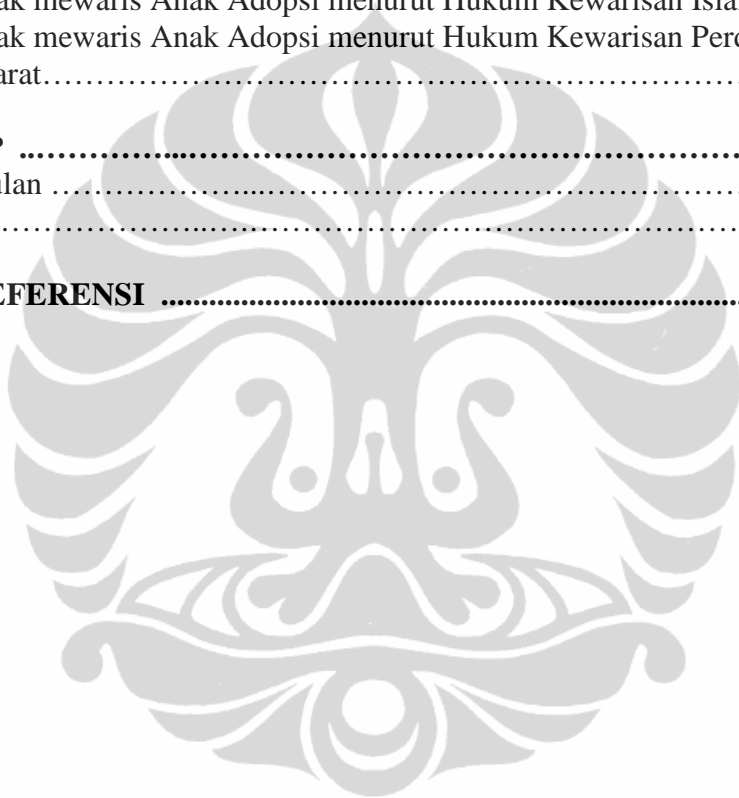
Yang menyatakan

(Diah Triani Puspita Sari)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	
DAFTAR ISI	viii
1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	13
C. Metode Penulisan	14
D. Sistematika Penulisan	16
2. PERKEMBANGAN PENGATURAN ADOPSI DI INDONESIA	18
A. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak	18
1. Sejarah Pengangkatan Anak	18
a. Sejarah Pengangkatan Anak Menurut <i>Staatsblad</i> 1917 Nomor 129.....	21
b. Sejarah Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat	24
c. Sejarah Pengangkatan Anak Menurut Perundang-undangan RI... 26	
d. Sejarah Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam.....	32
2. Tujuan dan Motivasi Pengangkatan Anak	35
3. Pengertian Pengangkatan Anak	37
a. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut <i>Staatsblad</i> 1917 Nomor 129.....	40
b. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat	43
c. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut PerUU RI	45
d. Pengertian Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam	49
4. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	52
3. IMPLEMENTASI PENGATURAN ADOPSI SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK	55
A. Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia Sebelum dan Sesudah Berlakunya Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	55
B. Kewenangan seorang Notaris terhadap pembuatan akta Notariil pengangkatan anak sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	72
1. Notaris sebagai Pejabat Umum Berwenang Membuat Akta Otentik .72	
a. Sejarah Notaris di Indonesia	72

b.	Fungsi dan Kedudukan Notaris	76
2.	Peranan dan Kekuatan Hukum Akta Notaris dalam Pembuatan Akta Notariil Pengangkatan Anak sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	84
C.	Permasalahan hukum yang timbul dari pengangkatan anak terhadap hubungan kewarisan antara orang tua angkat terhadap anak adopsi	100
1.	Tinjauan Umum Tentang Kewarisan	100
2.	Tinjauan Tentang Sistem Kewarisan di Indonesia	102
3.	Hak mewaris Anak Adopsi menurut Hukum Kewarisan Adat	111
4.	Hak mewaris Anak Adopsi menurut Hukum Kewarisan Islam	112
5.	Hak mewaris Anak Adopsi menurut Hukum Kewarisan Perdata Barat.....	113
4.	PENUTUP	114
A.	Simpulan	114
B.	Saran	116
	DAFTAR REFERENSI	117
	LAMPIRAN	



ABSTRAK

Nama : Diah Triani Puspita Sari
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Implementasi Pengaturan Adopsi Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Adopsi adalah suatu lembaga hukum yang terletak di bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Perorangan dan Kekeluargaan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W) yang kita warisi dari Pemerintah Hindia-Belanda tidak mengenal peraturan mengenai lembaga pengangkatan anak. Hanya bagi golongan Tionghoa yang diadakan pengaturannya secara tertulis di dalam Staatsblaad tahun 1917 No. 129. Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam masalah menyangkut ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ketidaksinkronan tersebut sangat jelas dilihat, apabila kita mempelajari ketentuan tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri dalam sumber-sumber hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik hukum Barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum adat yang merupakan "*the living law*" yang berlaku di masyarakat Indonesia, maupun hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas mutlak beragama Islam. Oleh sebab itu bagaimana hukum positif Indonesia mengatur mengenai pelaksanaan atau tata cara pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia dan bagaimana kewenangan seorang Notaris terhadap pembuatan akta Notariil pengangkatan anak sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta bagaimana permasalahan hukum yang timbul dari pengangkatan anak terhadap hubungan kewarisan antara orang tua angkat terhadap anak adopsi tersebut. Hukum positif Indonesia mengatur mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia melalui tiga sistem hukum yaitu, secara hukum adat, perundang-undangan dan hukum Islam, hal ini disebabkan karena keanekaragaman kulkur budaya yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia tetapi ketidaksinkronan pengaturan hukum tentang pengangkatan anak tersebut dapat diatasi dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007. Pengangkatan anak melalui notaris merupakan perintah *Staatsblad* 1917 Nomor 129, dalam perkembangannya, tujuan pengangkatan anak sudah berbeda dengan tujuan semula dan calon anak angkat tidak hanya orang Tionghoa laki-laki saja sehingga melibatkan pengadilan, pengangkatan anak melalui notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat Indonesia. Pengangkatan anak melalui pengadilan akan memberikan perlindungan kepentingan anak dan kepastian hukum. Dasar hukum untuk pengaturan hak waris anak adopsi dalam sistem kewarisan di Indonesia adalah menggunakan hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat, bagi hukum waris

adat dipergunakan kebiasaan adat yang berlaku dan dapat melihat kepada yurisprudensi atas kasus yang sama, dalam hukum waris Islam berpegang kepada wasiat wajibah atau hibah atau peraturan dalam Al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 KHI (mengenai wasiat wajibah) sedangkan hukum perdata dapat dilihat pada pasal-pasal yang menyangkut mengenai kewarisan.

Kata kunci :
Pengangkatan Anak/Adopsi



ABSTRACT

Name : Diah Triani Puspita Sari
Study Program: Magister of Notary
Title : Implementation Of Adoption Regulation After The Application Of Government Regulation Of The Republic Of Indonesia No. 54 / 2007 About Child Adoption Procedures

Adoption is a legal entity which is placed in Private Law, especially in Individual and Family Law. Civil Law Compilation Book (BW) which we inherited from The Dutch does not recognize regulation regarding child adoption. It is only regulated for the Chinese community in Staatsblad No. 129/1917. The existence of adoption in Indonesia as a legal entity has not been synchronized yet; therefore adoption is still a problem for Indonesian people, especially in regards with positive prevailing regulation in Indonesia. The non-synchronization is clearly visible if we study about the regulation about the existence of the adoption entity in all the positive law sources in Indonesia, either the western law which are taken from the regulations in Burgerlijk Wetboek (BW), the traditional law which is considered as “the living law” applicable in Indonesian community, or Islam Law which is the logical consequences of the Moslem majority in Indonesia. Therefore how Indonesian Law regulates the execution or procedures about child adoption in Indonesia and what is the power possessed by a notary in making the adoption deed before and after the application of Government Regulation No. 54/2007 regarding the Procedures of Child Adoption and what is the legal consequences that occur from the child adoption regarding parental inheritance of the foster parents to the adopted child. Indonesian positive law regulates the procedures of child adoption in Indonesia with three law system, which are; traditional law, private law and Islam law, it is caused by the cultural diversity in Indonesian society but the non-synchronization of the regulating law could be settled with the formation of Government Regulation No. 54/2007. Child adoption through the notary is an order of Staatsblad No. 129/1917, in the current development, the purpose of child adoption has differ from the original purpose, and the adopted child is not only male Chinese so it involves the court, child adoption through notary is no longer accordance with the law development in Indonesian society. Adoption through court will give protection for the child’s prosperity and ensure law. Legal base for inheritance rights adopted child in Indonesian inheritance system is by using traditional law, Islam law and western private law, for the traditional law, it is regulated by the prevailing tradition and could refer to jurisprudence in similar cases, in Islam inheritance law it refers wajibah inheritance or donation (hibah) or the regulation in Al-Quran and Islamic Law Compilation 209 KHI (regarding wajibah inheritance) while the private law could be seen in the articles regarding inheritance

Keyword:
Adoption